

Dialog

Vol. 40, No. 2, Des 2017

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

ISSN : 0126-396X

PENANGGUNGJAWAB

Prof. H. Abdurrahman Mas'ud, Ph.D.

MITRA BESTARI

Prof. Mark Woodward (Australian National University)

Prof. Robert Hefner (Boston University)

Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Prof. Dr. Masykuri Abdillah, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.A. (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Saiful Umam, Ph.D. (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

PEMIMPIN REDAKSI

Dr. H. Rohmat Mulyana Sapdi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Drs. H. Hefson Aras, M.Pd.

SEKRETARIS REDAKSI

Rahmatillah Amin, S.Kom.

DEWAN REDAKSI

Dr. H. Muhammad Adlin Sila, M.A. (Balai Litbang Agama Jakarta)

Prof. Dr. H. Imam Tholikhah (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan)

Dr. Hayadin, M.Pd. (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan)

Dr. H. Zainuddin Daulay (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan)

Dr. Acep Arifudin (Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi)

Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)

SEKRETARIAT REDAKSI

Heny Lestari, S.Pd.

Dra. Siti Atieqoh, M.Pd.

Wawan Hermawan, S.Kom.

Dewi Indah Ayu D., S.Sos.

Sri Hendriani, S.S.i.

SETTING LAYOUT & DESAIN GRAFIS

Abas, M.Si.

Rizky Riyadu Taufiq, M.A.

REDAKSI DAN TATA USAHA

Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat – Telp./Fax. (021) 3920688 – 3920662

e-mail : sisinfobalitbangdiklat@kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Jurnal Dialog sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.

Jurnal Dialog edisi kali ini menampilkan beberapa pembahasan yang memiliki spektrum yang cukup beragam. Beberapa kajian studi Islam yang tampil dalam tulisan di jurnal kali ini meliputi beberapa permasalahan umat Islam seperti *Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Indonesia melalui Filipina* oleh Zaenal Abidin yang membahas tentang pelaksanaan haji yang dilakukan sebagian warga Indonesia melalui negara tetangga, Filipina. Beberapa permasalahan yang disoroti dalam artikel ini meliputi kuota dan prosedur administratif haji baik yang legal maupun illegal. Tulisan ini juga memberikan gambaran tentang proses-proses hukum yang harus dihadapi dan dilakukan oleh warga negara Indonesia yang terbukti tidak memiliki dokumen-dokumen resmi dalam proses pemberangkatan haji melalui Filipina.

Artikel lain adalah tentang fungsi masjid yang berada di wilayah minoritas Islam di Paris Perancis oleh Muhammad Rais. Dalam artikelnya, Rais memberikan gambaran tentang fungsi ritual, fungsi administratif dan aktivitas sosial, ekonomi, budaya serta politik kebudayaan masjid agung Paris. Dalam artikelnya, Rais mencoba untuk memberikan analisis tentang fungsi masjid Agung di Paris yang mengalami dinamika seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Selain itu, tentunya, sebagai minoritas di negara ini, masjid juga memiliki fungsi sebagai media rekonsiliasi yang menjadi wadah untuk membangun hubungan sosial kemasyarakatan dan politik antara umat Islam dan negara serta antar umat Islam itu sendiri serta antara umat Islam dan non muslim. Gambaran ini menjadi penting diketahui dalam konteks hubungan antar peradaban mengingat dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peristiwa pemboman di Paris yang menunjukkan ketidaksukaan kelompok kecil keagamaan terhadap Perancis. Selain itu, gambaran kondisi umat Islam yang menjadi minoritas di Perancis bila dibandingkan dengan kondisi di Indonesia yang mayoritas berfungsi untuk menggugah kesadaran umat Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan pengaturan hubungan antara mayoritas dan minoritas yang berdasarkan

semangat toleransi serta kemanusiaan berdasarkan landasan kitab suci.

Tulisan berikutnya, berkaitan dengan wakaf yang disajikan oleh M. Taufik Hidayatullah dan Selamat yang menganalisis tentang sertifikasi tanah wakaf yang belum terlaksana dengan baik secara hukum dan sebab hal tersebut dapat terjadi. Selanjutnya tulisan ini juga berusaha untuk memberikan gambaran dan analisis tentang pelbagai permasalahan yang dihadapi oleh wakif dan yang menerima wakaf serta aparat negara terkait.

Dalam artikel tentang kebijakan manajemen yang berkaitan dengan dosen pendidikan agama dalam kasus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Achmad Dudin, berusaha untuk menampilkan analisis tentang persoalan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dosen Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi, yang membutuhkan perhatian untuk peningkatan yang lebih baik di masa depan. Beberapa permasalahan yang coba untuk ditampilkan meliputi permasalahan-permasalahan beban tugas dosen, rekrutmen dosen, pembinaan karir dosen, kreatifitas dan inovasi dosen dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam serta peningkatan program Diklat. Hal yang tak kalah pentingnya yang coba diangkat dalam tulisan ini adalah terkait dengan insentif dosen Pendidikan Agama Islam agar sesuai dengan standar kelayakan.

Artikel lain yang masih berkaitan dengan pendidikan adalah artikel Asep Saefullah yang mengangkat nilai-nilai Pendidikan Agama dalam cerita rakyat Banten yang mengambil contoh cerita tentang Legenda Gunung Pinang dan kaitannya dengan signifikansi ajaran agama untuk berbakti pada orang tua. Tulisan ini berusaha untuk memberikan analisis tentang keterkaitan nilai-nilai pendidikan agama yang terdapat di dalam cerita tersebut dengan tujuan pendidikan nasional.

Selanjutnya, tulisan Suprpto yang masih dalam konteks pendidikan mengambil tema peningkatan karakter anak didik dalam program pendidikan unggulan yang dikembangkan oleh Raudhatul Athfal al Ikhlas di Kota Padang

Sumatera Barat. Dalam tulisannya, Suprpto menekankan pentingnya pendidikan anak usia dini untuk menjadi basis pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta serta imajinasi anak untuk membantu perkembangan pikiran, jiwa, fisik, dan mental serta spiritual sang anak.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan pengembangan Pendidikan, Farida Hanun dalam tulisannya tentang *Pesantren Based Madrasah* berusaha untuk memberikan gambaran dan analisis tentang penyelenggaraan madrasah berbasis pesantren di MTS Al Hikmah Bandar Lampung. Tulisan ini berusaha untuk memberikan gambaran dan analisis tentang karakter dan penyelenggaraan madrasah yang berbasis pada pengajaran pesantren untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten.

Berikutnya, Qawaid dalam tulisannya tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Terpadu pada Sekolah Menengah Islam Nur Hidayah Surakarta* menampilkan analisis tentang kemunculan dan perkembangan Sekolah Islam Terpadu yang memiliki genre tersendiri. Artinya, sekolah terpadu merupakan sekolah dengan sistem asrama namun memberikan nuansa pesantren. Meskipun mengadopsi beberapa bentuk sistem pesantren namun sekolah terpadu tidak mengadopsi seluruh sistem pesantren namun memadukan antara beberapa sistem pesantren dengan sistem pendidikan umum.

Tulisan yang memiliki nuansa kebijakan lembaga keagamaan dan kaitannya dengan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara disajikan dalam tulisan Nasrullah Nurdin dalam *Peran dan Pengaruh Fatwa Media Sosial MUI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Dalam tulisannya, Nurdin menyoroti tentang penggunaan media sosial yang dilakukan secara negatif oleh sebagian orang untuk menjadi alat penyebar kebencian dan pemecah belah bangsa. Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan hal ini, Nurdin kemudian menganalisis peran MUI dalam usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena salah satu peran ulama dalam Islam adalah menjaga kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Keseluruhan tulisan-tulisan tersebut di atas, berusaha untuk memberikan gambaran dan analisis tentang problematika pelaksanaan ajaran keagamaan yang dihadapi masyarakat baik secara

formal ataupun non formal dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun mayoritas artikel dalam jurnal kali ini terkait pendidikan, namun kontekstualisasi pendidikan yang dipaparkan dan dianalisis oleh penulis berusaha untuk memberikan gambaran bahwa aspek pendidikan yang dilaksanakan memiliki dampak yang luas dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kaitannya dengan hal ini, perlu diingat salah satu ucapan Aristoteles yang menyatakan “siapa pun yang tahu seni memerintah suatu imperium atau suatu negara, maka ia akan memperhatikan pendidikan bagi generasi mudanya”. Relevan dengan signifikansi pendidikan dalam konteks Islam, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: *Lain yuaddibar rajulul walada khayrun lahu bian yatashaddaqa bi shaa 'in*, yang berarti; “Apabila seseorang mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, hal itu lebih baik baginya daripada bersedekah dengan satu gantang gandum atau kurma”. Pesan Islam tentang pendidikan tersebut merupakan bagian penting dari edisi jurnal kali ini yang menampilkan porsi tentang pendidikan lebih besar dari beberapa tulisan lainnya dalam kaitannya dengan konteks bermasyarakat dan peningkatan kualitas umat.

Mudah-mudahan tulisan-tulisan tersebut di atas dapat memberikan pencerahan bagi pembaca. Selamat membaca.

Salam redaksi.

DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol. 40, No. 2, Des 2017

ZAENAL ABIDIN

Pemberangkatan Calon Jemaah Haji Indonesia Melalui Filipina: 127-136

MUHAMMAD RAIS

Masjid Agung Paris di Jantung Kiblat Mode Dunia: 137-150

M. TAUFIK HIDAYATULLOH DAN SELAMET

Pemetaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2017: 151-172

ACHMAD DUDIN

Kebijakan Pengelolaan Dosen PAI: Studi Kasus di Kampus UGM Yogyakarta: 173-186

ASEP SAEFULLOH

Nilai Pendidikan Agama dalam Cerita Rakyat Banten: Legenda Gunung Pinang dan Berbakti Kepada Orang Tua: 187-204

SUPRAPTO

Pengembangan Karakter Anak Melalui Program Unggulan di Raudhatul Athfal Ikhlas Kota Padang Sumatera Barat: 205-222

FARIDA HANUN

Madrasah Berbasis Pesantren: 223-234

QOWAID

Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam Terpadu pada Sekolah Menengah Islam Nur Hidayah Surakarta: 235-248

NASRULLOH NURDIN

Peran dan Pengaruh Fatwa Medsos MUI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: 249-258

BOOK REVIEW

AHMAD MUJIB

Sisi Lain Sang Pangeran: 259-262

MANAGEMENT POLICY OF PAI LECTURER: CASE STUDY AT THE CAMPUS OF UGM YOGYAKARTA*

ACHMAD DUDIN*

ABSTRACT

This article presents the results of research in 2015 regarding the policy implementation for Islamic education teachers in higher education. This research took the case of Gajah Mada University (UGM) Yogyakarta. Data and information were obtained through qualitative research, through interviews with lecturers of Islamic Religious Education (PAI), experts and related officials and analysis of PAI lecturer management policy at UGM. The findings of this research point out some issues of PAI lecturers management, for example: the big task load for the lecturers, lack number of lecturers, lack of creativity and innovation, and lack of incentives. From these findings, it is suggested that some aspects need to be taken into accounts: the rationale of the lecturer's duties need to be revisited, the recruitment for new lecturers, the development of lecturers' career and competence, to improvement the creativity and innovation for lecturers through the training program, and the increase of lecturers' incentives through budgeting.

KEY WORDS: Policy, PAI lecturers, University of Gajah Mada

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DOSEN PAI: STUDI KASUS DI KAMPUS UGM YOGYAKARTA

ABSTRAK

Artikel ini memaparkan hasil penelitian pada tahun 2015 mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan dosen PAI di perguruan tinggi, yang menuntut perbaikan. Penelitian ini mengambil kasus di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Data dan informasi diperoleh melalui penelitian kualitatif, melalui wawancara dengan para dosen Pendidikan agama Islam (PAI), pakar dan pejabat terkait serta analisis terhadap kebijakan pengelolaan dosen PAI di UGM. Temuan penelitian ini menyebutkan beberapa persoalan kebijakan pengelolaan dosen PAI, misalnya: kurang rasionalitas beban tugas, kurangnya pembinaan dosen, kurangnya daya kreasi dan inovasi, serta persoalan insentif dosen PAI. Dari temuan ini disarankan beberapa hal, yaitu: perlunya memperhatikan rasional beban tugas dosen, rekrutmen untuk pemenuhan dosen, meningkatkan pembinaan dan karir dosen, meningkatkan kreatifitas dan inovasi dosen dalam pembelajaran PAI melalui program Diklat, dan perlunya penambahan insentif dosen PAI yang memadai melalui upaya penganggaran.

KATA KUNCI: Kebijakan, Dosen PAI, Kampus UGM

*) Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Email: achmaddudin@gmail.com

**) Naskah diterima September 2017, direvisi November 2017 dan disetujui untuk diterbitkan Desember 2017

A. PENDAHULUAN

Kebijakan pengelolaan dosen di Perguruan Tinggi Umum (PTU), terutama diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Peraturan Perundang-undangan yang lain yang secara implisit juga mengatur kebijakan pengelolaan dosen antara lain terdapat dalam Sistem Pendidikan Nasional, Standar Nasional Pendidikan, dan peraturan tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Kebijakan pengelolaan dosen di Perguruan Tinggi Umum (PTU) juga bersumber dari PTU itu sendiri, seperti surat keputusan rektor dan himbauan rektor. Dalam kebijakan pengelolaan dosen itu dijelaskan tentang definisi, fungsi, peran, dan kedudukan dosen, termasuk menjelaskan kebijakan rekrutmen (*recruitment*) dosen, kebijakan penempatan (*positioning*) dosen, kebijakan penguatan kompetensi dosen, kebijakan pembinaan dan pengawasan dosen, kebijakan kompensasi (*compensation*) dan penghargaan (*reward*) dosen.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas berfungsi sebagai dasar kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dosen, termasuk dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) di PTU. Namun dalam kenyataannya kebijakan tersebut sering kurang fungsional. Di antara faktor-faktor penyebabnya adalah persoalan sosialisasi kebijakan pengelolaan dosen PAI yang kurang memadai. *Stake holders* kurang memahami isi peraturan perundang-undangan sehingga masih terdapat pelanggaran terhadap aturan main tersebut. Teknis pelayanan kebijakan pengelolaan dosen PAI yang kurang profesional.

Faktor lain adalah dimungkinkan kebijakan itu dirumuskan kurang berbasis riset, sehingga kurang menggambarkan kebijakan yang berdasar pada kebutuhan pengelolaan dosen PAI di PTU.

Terkait dengan persoalan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dosen PAI di PTU menurut pengamatan masyarakat banyak dijumpai misalnya: (1) sering ditemukan rekrutmen dosen PAI yang kurang obyektif sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan dosen PAI, baik dilihat dari aspek seleksi, kriteria maupun hasil tes itu sendiri; (2) dijumpai pelaksanaan sistem penyebaran yang kurang merata dan masih dijumpainya dosen yang terpaksa harus mengampu mata kuliah yang kurang relevan dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan akademik dosen PAI, termasuk rasio mengajar dosen PAI dengan jumlah mahasiswa yang kurang tercukupi; (3) persoalan pembibitan dosen dan keikutsertaan diklat dosen PAI yang masih belum memadai; (4) kurang mendapatkan pengawasan dan pembinaan secara memadai, bagi dosen PAI; dan (5) tunjangan profesi dan sertifikasi yang memungkinkan belum ditangani secara rasional.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas diduga kebijakan pengelolaan dosen terutama dosen PAI di PTU dalam pelaksanaannya belum optimal. Belum lagi persoalan mutu dosen PAI yang bisa dilihat dari aspek kompetensi, kinerja, karya-karya dan pencitraannya yang kurang maksimal. Persoalan mutu dosen PAI akan menjadi sorotan utama dalam kebijakan pengelolaan dosen PAI itu sendiri. Oleh karena itu mutu dosen PAI harus menjadi perhatian utama bagi kebijakan pengelolaan dosen PAI dalam upaya peningkatan mutu pendidikan agama Islam di PTU.

Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2013 mengenai faham keagamaan dosen PAI di PTU, menyebutkan bahwa diantara syarat-syarat tertentu bagi dosen yang akan mengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam di Universitas Brawijaya adalah karena pertimbangan kemampuan calon dosen, antara lain: (1) berlatar belakang pendidikan agama Islam (PTAI baik negeri maupun swasta); (2) minimal berpendidikan S2 dari kampus dengan akreditasi minimal B; dan (3) menguasai bahasa Inggris baik aktif maupun pasif, dan (4) menguasai bahasa

Arab baik aktif maupun pasif; dan termasuk memperhatikan pertimbangan wawasan kebangsaan yang kuat. Pertimbangan kemampuan calon dosen PAI itu menunjukkan mutu atau kualitas dosen PAI menjadi perhatian yang strategis, termasuk fenomena pelaksanaan kebijakan pengelolaan dosen PAI yang belum optimal itu merupakan persoalan yang harus diselesaikan.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka penelitian kebijakan pengelolaan dosen PAI di PTU adalah strategis untuk dilaksanakan, terutama bagi perbaikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dosen PAI di PTU. Penelitian kebijakan pengelolaan dosen PAI di PTU kali ini mengambil kasus Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. UGM Yogyakarta merupakan sebuah PTU yang eksistensinya dapat menjadi barometer bagi pengembangan kebijakan pengelolaan dosen, terutama dosen PAI PTU di Indonesia. Hasil Penelitian ini pada gilirannya dapat menjadi bahan kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan PAI di PTU.

Rumusan Masalah

Secara umum rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pengelolaan dosen PAI? Adapun penelitian secara khusus adalah: (a) bagaimana identitas dosen PAI; (b) bagaimana pelaksanaan kebijakan rekrutmen dosen PAI?; (c) bagaimana pelaksanaan kebijakan penempatan atau distribusi dosen PAI?; (d) bagaimana pelaksanaan kebijakan penguatan kompetensi dosen PAI?; (e) bagaimana pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan dosen PAI?; (f) bagaimana pelaksanaan kebijakan kompensasi dan penghargaan dosen PAI?; (g) bagaimana kompetensi dosen PAI?, dan terakhir (h) apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dosen PAI.

Tujuan Penelitian:

Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan pengelolaan dosen PAI. Adapun tujuan penelitian khusus adalah mengetahui: (a) Identitas dosen PAI, (b) pelaksanaan kebijakan rekrutmen dosen PAI?; (c) pelaksanaan kebijakan penempatan atau distribusi dosen PAI?; (d) pelaksanaan kebijakan

penguatan kompetensi dosen PAI?; (e) bagaimana pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan dosen PAI?; (f) pelaksanaan kebijakan kompensasi dan penghargaan dosen PAI?; (g) kompetensi dosen PAI; dan (h) ingin mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dosen PAI.

B. KAJIAN LITERATUR

Kebijakan

Kata kebijakan dalam bahasa Inggris *policy*, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Kebijakan, sinonim artinya dengan posisi atau pendirian; atau bagian dari kegiatan tertentu atau teguh terhadap suatu aturan. Namun, arti kebijakan bila digabungkan akan berarti panduan baik bagi mereka yang akan melaksanakannya dan mereka yang mengamatinya. Kebijakan juga berarti rencana kegiatan atau pernyataan tujuan-tujuan ideal.

Said Zainal Abidin menyatakan bahwa kebijakan secara umum, dapat dibedakan dalam tiga tingkatan: Pertama, kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan; Kedua, kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang; Ketiga, kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Terhadap produk kebijakan dapat dilakukan analisis. Analisis terhadap produk kebijakan merupakan suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi kebijakan. Proses analisis kebijakan tersebut dilakukan melalui tahapan penilaian kritis dan pengkomunikasian substansi kebijakan yang saling terkait, yang secara bersama-sama membentuk siklus aktivitas yang kompleks dan tidak linier.

Berdasarkan teori kebijakan diatas maka yang dimaksud dengan kebijakan dalam penelitian ini adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal baik dari

pemerintah maupun Perguruan Tinggi Umum, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai yang dikehendakinya. Adapun terhadap produk kebijakan itu dilakukan analisis untuk mendapatkan penilaian kritis berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Pengelolaan

Beberapa definisi pengelolaan menurut para ahli, terdapat perbedaan-perbedaan, namun pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pengelolaan merupakan suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Harsoyo pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun Soewarno Handyaningrat menyatakan bahwa pengelolaan bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Berdasarkan teori tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan dalam penelitian ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Dalam konteks pengelolaan dosen PAI, maka unsur perencanaan itu meliputi rekrutmen dan *job description*; pengorganisasian itu menyangkut

penempatan atau distribusi dosen PAI, dan penguatan kompetensi dosen PAI; penggerakan itu meliputi pembinaan; pengawasan terkait *monitoring* dan *control*/pengawasan; *reward* menyangkut pemberian kompensasi dan penghargaan dosen PAI. Pengelolaan dosen PAI juga menyangkut pengelolaan kompetensi dosen PAI yang berujung pada mutu dosen PAI yang akan dilihat dilihat dari aspek kompetensi dan kinerja dosen PAI di PTU.

Dosen Pendidikan Agama Islam

Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen PAI harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Secara formal, kualifikasi dosen PAI, diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti yang menyebutkan bahwa: (1) Dosen berijazah Magister (S2) di bidang agama, apabila belum tersedia dosen yang berijazah Magister (S2) dapat diangkat dosen yang berijazah Sarjana (S1) di bidang agama, yang dinilai memiliki kompetensi oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan; (2) Cendekiawan agama yang memiliki kompetensi sebagai dosen, atau seseorang yang direkomendasi oleh lembaga pendidikan keagamaan dan/atau lembaga keagamaan.

Sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan perguruan tinggi, dosen PAI harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Dalam Peraturan Perundangan Pendidikan Nasional telah dirumuskan 4 macam kompetensi dosen/guru, termasuk dosen/guru PAI, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Dalam penjelasan, empat kompetensi dosen PAI itu: Pertama, Kompetensi Profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya; Kedua, Kompetensi Pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa; Ketiga, Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk

secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya; dan Empat, Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*. Termasuk melaksanakan tugas pokok tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kebijakan Pengelolaan Dosen PAI

Penelitian kebijakan pengelolaan dosen PAI mencoba menganalisis dan memberikan penilaian kritis berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kompetensi dosen PAI. Kebijakan sebagai aturan tertulis, merupakan keputusan formal baik dari pemerintah maupun Perguruan Tinggi Umum, yang bersifat mengikat, dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai yang dikehendaki. Kebijakan pengelolaan dosen PAI dapat dilihat dari kebijakan pengelolaan dosen PAI.

Dalam konteks pengelolaan dosen PAI, maka: unsur perencanaan, meliputi rekrutmen dan *job description*; pengorganisasian, menyangkut penempatan atau distribusi dosen PAI, dan penguatan kompetensi dosen PAI; pergerakan, meliputi pembinaan, dan pengawasan terkait *monitoring* dan *control*; *reward*, menyangkut pemberian kompensasi dan penghargaan dosen PAI. Pengelolaan dosen PAI juga menyangkut pengelolaan kompetensi dosen PAI yang berujung pada mutu dosen PAI yang akan dilihat dari aspek kompetensi dan kinerja dosen PAI di UGM.

Kebijakan pengelolaan dosen PAI juga menyangkut kebijakan pengelolaan dosen PAI. Kebijakan pengelolaan dosen PAI meliputi; identitas dosen PAI, penempatan dosen PAI, rekrutmen dosen PAI, pengembangan karir dosen PAI, penguatan kompetensi dosen PAI, pembinaan dan pengawasan dosen PAI, tingkat kompensasi Dosen PAI, dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kebijakan dosen PAI

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli hingga Oktober 2015. Lokasi penelitian adalah Universitas Gajahmada Yogyakarta. Universitas

Gajahmada Yogyakarta merupakan sebuah PTU di Indonesia yang eksistensinya dapat menjadi barometer bagi pengembangan kebijakan pengelolaan dosen, terutama dosen PAI PTU di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengisian daftar isian, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Teknik terakhir adalah telaah dokumen. Telaah dokumen dilakukan untuk menyelidiki benda-benda tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelaahan dokumen dilakukan pada dokumen terkait penelitian ini, yaitu pada keputusan Rektor, surat menyurat, notulen rapat dst.

Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah data terkumpul. Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis yang digunakan mencakup tiga proses analisis seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, penggambaran dan pembuktian data.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada, yang disingkat UGM, merupakan universitas negeri di Indonesia yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1949 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Tentang Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universitas tanggal 16 Desember 1949. Kampus UGM yang terletak di Yogyakarta tersebut merupakan universitas pertama yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia setelah Indonesia merdeka. UGM berperan sebagai pengawal dan pengkaji Pancasila dan Universitas pembina di Indonesia.

Sejak berdiri 19 Desember 1949 hingga kini, UGM telah dipimpin oleh 15 orang Rektor. Pimpinan Universitas pertama adalah Prof. Dr. M. Sardjito (1949-1961). Waktu itu belum menyandang sebutan Rektor, melainkan Presiden Universitas. Rektor yang menjabat saat ini adalah Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. dari Fakultas Teknik yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan

Alumni. Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D. menggantikan Prof. Pratikno yang terpilih menjadi Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Di lihat dari Visi, Misi dan Program Pendidikan, maka: (1) Visi UGM adalah, sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila; (2) Misi UGM adalah, menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat; dan (3) Program pendidikan UGM meliputi program akademik dan program pendidikan profesional. Pertama, program akademik, tujuan umum program akademik adalah menyiapkan peserta didik (mahasiswa) menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bidang keahliannya. Program pendidikan akademik yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada terdiri atas Program Sarjana, program Pasca Sarjana, dan Program Pendidikan Professional yang terdiri atas Program Diploma 1, Program Diploma III, Program Diploma IV, Program Profesi, dan Program Spesialis I.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dosen

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang kebijakan pengelolaan dosen PAI maka diuraikanlah tentang implementasi kebijakan pengelolaan dosen PAI. Dalam pembahasan ini diuraikan tentang realitas dan analisisnya tentang pelaksanaan kebijakan pengelolaan dosen PAI UGM dan faktor penentu kebijakan pengelolaan dosen PAI UGM

Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang penelitian ini bahwa kebijakan pengelolaan dosen pendidikan agama Islam (PAI) di Perguruan Tinggi Umum (PTU) termasuk di Universitas Gajah Mada (UGM), terutama di atur dalam (1) UUD 1945 dan UUD 1945 yang diamandemen pasal 29 dan 31. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peraturan Perundang-undangan lain yang secara implisit juga mengatur kebijakan pengelolaan dosen PAI antara lain terdapat dalam: (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); (4) SK Dirjen Dikti Depdiknas No: 43/DIKTI/Kep/2006, tentang perkuliahan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum; (5) Peraturan Menteri (Diknas) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidik; (6) Peraturan Menteri (Diknas) Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; dan (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam kebijakan pengelolaan dosen itu dijelaskan tentang definisi, fungsi, peran, dan kedudukan dosen, termasuk menjelaskan kebijakan rekrutmen (*recruitment*) dosen, kebijakan penempatan (*positioning*) dosen, kebijakan penguatan kompetensi dosen, kebijakan pembinaan dan pengawasan dosen, kebijakan kompensasi (*compensation*) dan penghargaan (*reward*) dosen. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas berfungsi sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan dosen, termasuk dosen PAI di PTU termasuk UGM. Kebijakan pengelolaan dosen PAI di PTU juga bersumber dari PTU itu sendiri, seperti surat keputusan rektor dan himbauan rektor. Di UGM kebijakan pengelolaan dosen PAI diserahkan oleh universitas ke Fakultas Filsafat untuk mengelola MPK termasuk PAI dan pengelolaan dosen PAInya. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor UGM No. 1/1963 tanggal 25 Januari 1963, telah dibentuk Biro Penyelenggaraan Kuliah-Kuliah khusus di UGM, disingkat BPKKC. Tugas BPKKC adalah memelihara dan menyelenggarakan kuliah; Filsafat, Ideologi Negara, Pendidikan Agama, dan *Studium Generale* di lingkungan UGM. Pertanyaannya apakah kebijakan itu dalam pelaksanaannya sudah

fungsional? Inilah yang mesti dijawab dalam penelitian ini. Berikut dijelaskan implementasi kebijakan pengelolaan dosen PAI.

Identitas Dosen PAI

Pengelolaan dosen PAI di UGM bukan di tingkat universitas tetapi diserahkan secara substantif kepada fakultas filsafat. Fakultas filsafat disertai untuk mengelola Matakuliah Pengembangan Kepribadian yang didalamnya terdapat matakuliah pancasila, kewiraan dan pendidikan agama. Kecuali matakuliah Bahasa Indonesia diserahkan secara substantif kepada Fakultas Ilmu Budaya. Begitu pula pengelolaan dosennya, maka pengelolaan dosen PAI mulai dari rekrutmen, penempatan, pembinaan, sampai dengan penghargaan menjadi kewenangan Fakultas Filsafat.

Dosen PAI negeri di Fakultas Filsafat termasuk juga dosen MPK kecuali matakuliah bahasa, jumlahnya ada 6 orang (tahun 2015). Enam orang itu adalah Dr. Muhtasar S, Dr. Ridwan, SS M.Hum, Dr. Hj. Widyastini, M.hum, Dr. Ahmad Zubaidi, Drs. Farid Mustafa M.Hum., Drs. Mustafa AA. M.hum,. Untuk menutupi kekurangan kebutuhan dosen Agama Islam Fakultas mengangkat dosen agama honorer sebanyak 13 orang. Jadi jumlah dosen agama Islam seluruhnya 19 orang. Dosen Fakultas Filsafat yang terkadang mengajar pendidikan agama ada 4 orang. Bila dijumlahkan semuanya menjadi 23 orang. Dari 23 orang dosen PAI, terdapat 16 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Di samping itu UGM mengangkat dosen honorer untuk dosen agama Katolik, Kristen, Hindhu, dan Budha. Jumlah seluruh dosen agama termasuk Islam mencapai 46 orang.

Berdasarkan latar belakang pendidikannya dosen PAI UGM telah sesuai dengan kepakaran, yaitu berasal dari program studi agama, dan humaniora. Ini artinya mereka secara substansi telah memenuhi sarat untuk mengajar PAI, walaupun tidak semua dari lulusan pendidikan Islam. Jadi, dosen UGM, mengampu mata kuliah PAI telah relevan dengan latar belakang akademiknya.

Kebijakan Rekrutmen

Mekanisme rekrutmen dosen PAI di UGM dilakukan secara terbuka dan selektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen

dosen PAI UGM, dibicarakan dalam rapat terbuka, dan publik juga mengetahui, karena diumumkan. Syarat dalam rekrutmen dosen PAI di UGM adalah memiliki kapasitas untuk mengajar PAI, baik pendidikan formal maupun non formal. Termasuk memiliki kompetensi dan sikap kepribadian yang baik.

Waktu pelaksanaan rekrutmen dosen PAI di UGM, biasanya dilakukan pada awal semester. Orang yang terlibat dalam rekrutmen dosen PAI di UGM adalah pengelola Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Termasuk pengurus fakultas Filsafat dan pengelola PAI. Untuk mekanisme pengambilan keputusan dalam penentuan dosen PAI di UGM atas dasar musyawarah bersama hasil seleksi dan kebutuhan dosen.

Kebijakan Penempatan

Kebijakan penempatan dosen PAI di UGM, menurut pengelola MPK, yaitu: (a) menempatkan dan menugaskan dosen-dosen tetap MPK Fakultas Filsafat UGM untuk mengajar PAI; (b) meminta bantuan dosen-dosen PAI dari UIN Sunan kalijaga; dan (c) alumni S2 Filsafat yang S1 nya dari IAIN/UIN. Menurut pengakuan mantan ketua MPK Fakultas Filsafat UGM, bahwa dosen PAI di UGM utamanya adalah mereka yang ditugaskan oleh Kemenag, akan tetapi walaupun jumlahnya tidak mencukupi diambil dosen di lingkungan UGM dengan basis sekolah agama Fakultas Filsafat UGM, sekarang ini kebanyakan dosen PAI dari UIN. Dosen PAI dari UIN merupakan dosen yang difungsikan Kemenag, di samping itu sebagai dosen tidak tetap.

Untuk mekanisme penempatan dosen PAI di UGM adalah berdasarkan permintaan dari fakultas di lingkungan UGM. Fakultas Filsafat UGM yang berdasarkan SK Rektor ditunjuk sebagai pengelola MPK yang di dalamnya adalah PAI, maka kebijakan penempatan dosen PAI berada di fakultas filsafat. Sistem penempatan dosen PAI dilakukan berdasarkan permintaan dari fakultas di lingkungan UGM, yaitu fakultas filsafat mengirim dosen PAI untuk mengajar di fakultas yang meminta. Namun kebanyakan dari fakultas mengirimkan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kuliah PAI, pihak fakultas menentukan pembagian kelas, dan rata-rata perkelas /rombongan belajar berjumlah 60 an

mahasiswa, membagi dan menugaskan dosen PAI mengajar masing-masing 2 atau 3 rombel perminggu.

Kebijakan Pengembangan karir

Mekanisme pembagian tugas dosen PAI di UGM menurut pengelola MPK UGM, adalah pembagian tugas berdasarkan kebutuhan permintaan dari fakultas-fakultas dengan memperhatikan beban tugas yang merata. Adapun menurut staf pengajar PAI UGM bahwa setiap dosen PAI mengajar satu kelas secara individual, hanya beberapa dosen PAI melaksanakan dengan *team teaching* (pengajaran tim). *Team teaching* merupakan pendekatan pengajaran tim yang memungkinkan lebih banyak interaksi antara dosen dan mahasiswa. Terdapat enam model *team teaching*, yaitu: (1) *One Teach/One Observe*, yaitu satu dosen terutama bertanggung jawab untuk menyampaikan pengajaran ke seluruh kelas, sementara dosen lainnya bertugas sebagai pengamat yang disengaja. Saat mengamati, dosen ini dapat mengamati dan mencatat perilaku mahasiswa, pemahaman mahasiswa, atau bahkan gaya dan perilaku dosen mengajar; (2) *One Teach / One Assis*, yaitu dosen membagi tanggung jawab mengajar sehingga satu dosen menyampaikan pelajaran dan dosen lainnya memantau dan membantu mahasiswa yang mungkin memerlukan pertolongan; (3) Pengajaran Stasiun, dalam pengajaran stasiun bisa melibatkan pengajaran konten baru, penguatan materi yang telah dipelajari sebelumnya, atau kegiatan menantang bagi mahasiswa yang sudah siap. Yaitu para dosen membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok dan menciptakan kegiatan bagi mahasiswa untuk terlibat dengan materi pelajaran beserta bantuan seorang dosen.; (4) Pengajaran Paralel, dalam model ini, para dosen membagi kelas menjadi dua. Setiap dosen bekerja dengan salah satu kelompok mahasiswa, mengajarkan konten yang sama persis. Dosen dapat memutuskan untuk membagi kelompok secara acak, atau untuk membagi kelas sesuai tingkat kesiapan untuk pelajaran atau gaya belajar yang disukai; (5) Pelajaran Alternatif atau Perbedaan, yaitu salah satu dosen mengajarkan pelajaran utama kepada sebagian besar kelas. Dosen kedua bekerja dengan sekelompok kecil siswa untuk memberikan bantuan perbaikan atau untuk

memperpanjang pelajaran dengan materi yang lebih menantang; dan (6) Model *Teaming*, pendekatan ini melibatkan kedua dosen yang bekerja sama untuk menyampaikan pengajaran kepada kelompok mahasiswa yang sama pada saat bersamaan.

Untuk mekanisme pembinaan dosen PAI di UGM yaitu dosen PAI dikirim mengikuti pelatihan, workshop, lokakarya pendidikan agama Islam, baik yang dilakukan oleh UGM, Kemenristek Dikti atau dari Kementerian agama. Adapun lokakarya dosen PAI di lingkungan UGM yang dikelola MPK sifatnya *incidental*. Untuk Mekanisme pengawasan dosen PAI UGM dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa (sebagai penilaian/evaluasi dari mahasiswa) pada akhir perkuliahan. Di samping itu mekanisme pengawasan dosen PAI UGM melalui jurnal mengajar. Monitoring dosen PAI di UGM yaitu dilakukan dengan daftar hadir perkuliahan. Termasuk monitoring dosen PAI UGM dilakukan pada saat evaluasi tiap semester. Pemberian sanksi untuk dosen PAI UGM, yaitu bagi dosen yang tidak memenuhi syarat dengan ketentuan, akan diberhentikan dari tugas mengajar. Bentuk pelaporan kegiatan dosen PAI di UGM yaitu mengikuti standar pelaporan tugas mengajar yang sudah ada dengan mekanisme yang terstruktur. Pelaporan dilakukan secara periodik setiap semester ke dekan dan diteruskan ke rektor UGM.

Ada satu hal penting perlu dijelaskan di sini, yaitu dengan penempatan dosen PAI UGM di fakultas filsafat, maka jenjang karir dosen PAI tidak ada masalah. Hal ini karena kepakaran secara substantif ada di fakultas filsafat itu sendiri, yaitu kepakaran yang dapat menilai dosen PAI mencapai pangkat tertinggi dan jabatan tertinggi seperti profesor. Di samping itu aturan yang ada telah mendukung dosen PAI dapat memperoleh gelar profesor.

Kebijakan Penguatan kompetensi

Kebijakan penguatan kompetensi dosen PAI UGM, yaitu melalui workshop, pelatihan dan pendidikan, symposium atau seminar tentang PAI. Di samping itu dengan meningkatkan status pendidikan dosen PAI dan mengikutkan dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi di tingkat lokal maupun nasional. Kegiatan orientasi berdasarkan kompetensi yang harus

dimiliki dosen PAI. Adapun kegiatan peningkatan kompetensi dosen PAI masih bersifat insidental.

Pengelolaan Diklat penguatan kompetensi dosen PAI UGM, yaitu dilakukan sesuai kebutuhan, namun sering mengirim staf dosen PAI ke pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ada pengakuan salah satu dosen PAI UGM yang menyatakan bahwa Diklat penguatan kompetensi dosen PAI di UGM belum dilaksanakan secara terstruktur dan periodik. Untuk pengelolaan seminar/simposium/lokakarya tentang penguatan kompetensi dosen PAI UGM yaitu mengikuti kebijakan Kemendikti atau sekarang Kemenristek Dikti.

Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan

Pelaksanaan bimbingan Konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik dan kecenderungan perkembangan mata kuliah PAI UGM cukup berkembang tetapi perlu diberi ruang penyamaan persepsi. Perkembangan matakuliah PAI UGM mengikuti materi yang disusun oleh Dikti. Pelaksanaan pembimbingan dalam menyusun silabus PAI UGM yaitu sudah ada lokakaryanya bersama untuk dosen MPK-PAI. Adapun silabus PAI UGM mengikuti kebijakan Dikti. Pelaksanaan pembimbingan dalam memilih dan menggunakan strategi, metode, teknik pembelajaran PAI, mengikuti Dikti dan dilaksanakan melalui kegiatan lokakarya. Pelaksanaan pembimbingan dalam menyusun SAP PAI di UGM, adalah melalui lokakarya pembelajaran PAI. Dalam konteks ini juga Dikti telah menyusun materi PAI *e-book* yang di dalamnya terdapat SAP-PAI.

Pelaksanaan pembimbingan dalam pembelajaran di kelas/laboratorium PAI/tempat ibadah yaitu dilakukan melalui kegiatan asistensi agama Islam. Akan tetapi eksistensi PAI cukup sistematis. Adapun pembelajaran PAI dilakukan dengan diskusi dan penugasan. Untuk pelaksanaan pembimbingan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas/laboratorium PAI/tempat ibadah ada pelatihan untuk dosen-dosen PAI UGM, dan dosen dari luar UGM mengikuti kegiatan di universitas masing-masing. Adapun untuk pembimbingan dilakukan dengan menugaskan mahasiswa aktif dalam kegiatan keagamaan oleh dosen-dosen PAI. Pelaksanaan pembimbingan dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam

pembelajaran PAI yaitu untuk dosen PAI dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan motivasi dan penilaian kinerja dosen PAI yaitu dengan cara meningkatkan insentif mengajar dan kelengkapan sarana perkuliahan PAI. Di samping itu upaya peningkatan motivasi dan penilaian kinerja dosen PAI dengan memberikan penghargaan yang cukup kepada dosen PAI. Pelaksanaan pembimbingan profesi dosen PAI UGM, yaitu dosen PAI Kemenag di UGM dapat mengikuti pembimbingan karir di universitas induk dan mengikuti kegiatan akademik penelitian di lingkungan UGM. Di samping itu bimbingan profesi dilakukan dengan pelatihan, seminar dan workshop.

Kebijakan Kompensasi dan Penghargaan

Kebijakan dalam pemberian kompensasi bagi dosen PAI UGM, hal ini karena semua dosen PAI baik dari dosen PAI fakultas Filsafat ataupun dosen PAI yang direkrut atau dimohonkan kepada dosen PAI UIN adalah dosen PNS, maka untuk gaji dan tunjangan diberikan oleh instansi masing-masing. Untuk kompensasi pengajaran, diberikan kepada dosen PAI sesuai dengan beban mengajar dosen PAI tersebut.

Ini artinya untuk kebijakan kompensasi dan penghargaan dosen PAI di UGM adalah sudah cukup baik. Untuk sumber pembiayaan kompensasi/honor bagi dosen PAI UGM berdasarkan status kepegawaian dosen PAI itu sendiri, yaitu pegawai PAI dengan status kepegawaian PNS dibiayai terutama oleh pemerintah, yaitu gaji pokok dan gaji tunjangan dosen. Di samping mendapatkan juga insentif tambahan dari kelebihan jam mengajar, dan semua beban tugas mengajar dianggap sebagai kelebihan mengajar di tambah plus-plus lain, menurut pengakuan dosen PAI, memperoleh kompensasi mengajar PAI kurang lebih 1.750.000,-. Terakhir untuk kebijakan kompensasi dan penghargaan dosen PAI UGM terutama untuk dukungan dana sertifikasi dan insentif bagi dosen PAI UI, diberikan oleh Kemendikbud. Dukungan dana sertifikasi dan insentif bagi dosen PAI telah diberikan.

Tingkat Kompetensi Dosen

Untuk tingkat kompetensi dosen PAI UGM, dilakukan pengisian angket tentang kompetensi

beberapa dosen PAI, dan sifatnya kasus belaka. Untuk keperluan pengisian angket dosen PAI dengan cara mengisi kolom penilaian berdasarkan skala berikut: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Adapun hasil pengisian angket untuk tingkat kompetensi dosen PAI UGM diuraikan berdasarkan bidang kompetensi dosen PAI. Untuk pertama bidang kompetensi professional dosen PAI UGM, yaitu: (1) Kepemilikan kompetensi akademik dosen PAI UGM yang relevan dengan orientasi program studi sudah sangat sesuai, ketika ditrianggulasi jawaban mereka juga sama yaitu sudah sangat sesuai; (2) Kepemilikan karya ilmiah formal (skripsi, tesis, disertasi) ini di jawab oleh dosen PAI UGM adalah sudah sangat sesuai; (3) Kepemilikan karya ilmiah yang dipublikasikan; untuk indikator ini mereka menjawab sudah sangat sesuai; (4) Penguasaan materi ajar secara luas, untuk indikator ini mereka juga menjawab sudah sangat sesuai; (5) Kemampuan merancang penelitian berbasis desain proposal, untuk indikator ini mereka ada yang menjawab sudah sangat sesuai dan ada yang menjawab sesuai saja; (6) Kemampuan melaksanakan penelitian, untuk indikator ini juga ada yang menjawab sudah sangat sesuai dan ada yang menjawab sesuai saja; (7) Kemampuan menyusun laporan penelitian, untuk indikator ini juga mereka ada yang menjawab sudah sangat sesuai dan ada yang menjawab sesuai saja; (8) Kemampuan mengembangkan bidang keahlian untuk melakukan inovasi bidang ilmu pengetahuan, untuk indikator ini sudah sangat sesuai; dan (9) Kemampuan pengabdian masyarakat berbasis desain, untuk indikator ini mereka ada yang menjawab sudah sangat sesuai dan ada yang menjawab sesuai saja.

Keadaan ini menunjukkan bahwa penilaian tentang aspek kompetensi professional sudah sangat sesuai dan ada yang mengatakan sudah sesuai saja. Seperti kepemilikan karya tulis ilmiah formal (skripsi, tesis, disertasi) yang isinya relevan dengan yang dibutuhkan oleh program studi, kemampuan merancang penelitian berbasis desain proposal, kemampuan melaksanakan penelitian, kemampuan menyusun laporan penelitian, dan kemampuan mampu melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis desain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk kompetensi profesional dosen PAI UGM dapat dinilai sudah

sangat kompeten.

Selanjutnya untuk kompetensi pedagogik dosen PAI adalah: (1) Kemampuan merancang mata kuliah dalam bentuk silabus, SAP, RPP, *outline* dan *handout*, untuk indikator ini mereka juga menjawab sudah sangat sesuai; (2) Kemampuan mengelola proses pembelajaran sesuai dengan tingkat kompetensi yang dikembangkan, untuk indikator ini mereka juga menjawab sudah sangat sesuai; (3) Kemampuan mendesain kompetensi suatu mata kuliah dalam sebuah pembelajaran, untuk indikator ini juga mereka ada yang menjawab sudah sangat sesuai dan ada yang menjawab sesuai saja; dan (4) Kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran baik proses maupun produk secara objektif dan fair, untuk indikator ini mereka menjawab sudah sangat sesuai. Di sini dapat dipahami bahwa untuk kompetensi pedagogik, dosen PAI dapat dinilai sudah memadai.

Selanjutnya untuk kompetensi kepribadian dosen PAI UGM, yaitu: (1) Memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya, untuk indikator ini mereka juga menjawab sudah sangat sesuai; (2) Memiliki perangai yang ramah, untuk indikator ini juga mereka ada yang menjawab sudah sangat sesuai dan ada yang menjawab sesuai saja; (3) Memiliki kewibawaan, untuk indikator ini mereka juga menjawab sudah sesuai saja; (4) Memiliki rasa humor, untuk indikator ini mereka juga menjawab sudah sesuai saja; (5) Berpenampilan rapi dan sopan, untuk indikator ini mereka juga menjawab sudah sangat sesuai; (6) Bersikap terbuka dalam menerima kritik dan saran, untuk indikator ini mereka juga menjawab sudah sangat sesuai; (7) Memberikan teladan dalam menanamkan nilai-nilai moral, untuk indikator ini mereka juga menjawab sudah sangat sesuai; (8) Mampu memaknai kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam (*living value*), untuk indikator ini mereka juga menjawab sudah sangat sesuai; (9) Memiliki motivasi untuk berdedikasi terhadap lembaga, untuk indikator ini mereka juga menjawab sudah sangat sesuai; dan (10) Mampu menunjukkan sikap-sikap *leadership* khususnya dalam konteks pendidikan tinggi, untuk indikator ini mereka juga menjawab sudah sangat sesuai. Di sini dapat dipahami bahwa untuk kompetensi kepribadian, dosen PAI dapat dinilai sebagian besar sudah memadai.

Untuk kompetensi sosial dosen PAI adalah:

(1) Kemampuan meningkatkan kualitas interpersonal, mereka menjawab sudah sangat sesuai dan ada yang menjawab sesuai saja; (2) Kemampuan meningkatkan kualitas intrapersonal, mereka menjawab sudah sangat sesuai dan sesuai saja; (3) Kemampuan mengaplikasikan perilaku asertif dalam berkomunikasi dengan sesama, mereka menjawab sudah sangat sesuai;; (4) Kemampuan mempraktekkan beberapa teknik keterampilan sosial, mereka menjawab sudah sangat sesuai dan ada yang menjawab sesuai saja; dan (5) Kemampuan memanfaatkan potensi sosial untuk mempresentasikan diri dan lembaga kepada institusi, mereka menjawab sudah sangat sesuai. Di sini dapat dipahami bahwa untuk kompetensi sosial, dosen PAI UGM dapat dinilai sudah memadai.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Pengelolaan Dosen PAI

Di lihat dari faktor pendukung kebijakan pengelolaan dosen PAI UGM, yaitu: (1) Ketersediaan peraturan yang memungkinkan dosen PAI menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Yaitu penugasan oleh universitas ke fakultas Filsafat untuk mengelola kuliah MPK termasuk PAI; (2) Semangat kebersamaan dosen PAI dalam peningkatan mutu PAI di UGM yaitu sebelum perkuliahan dimulai diadakan acara pertemuan pengelola dosen PAI. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan dosen PAI dalam peningkatan mutu PAI adalah cukup bagus; (3) Dukungan dana sertifikasi dan insentif bagi peningkatan mutu PAI UGM yaitu dana sertifikasi dari pemerintah sedangkan insentif oleh dana masyarakat UGM; dan (4) Harapan untuk kebijakan pengelolaan dosen PAI UGM ke depan yaitu perlu penambahan dosen tetap PAI. Di samping itu harapan untuk kebijakan pengelolaan dosen PAI UGM ke depan, diperlukan status dosen PAI yang dapat mempunyai fungsi dan hak kewajiban yang sama dengan dosen UGM. Ada kasus dosen PAI Kemenag yang kurang dapat mengikuti semua tawaran aktivitas yang diajukan UGM.

Di lihat dari faktor penghambat kebijakan pengelolaan dosen PAI UGM, yaitu: (1) Persoalan terbatasnya jumlah dosen PAI, terutama dosen PAI tetap di UGM. Menurut pengakuan salah satu staf dosen PAI UGM bahwa di UGM jumlah

dosen resmi (diangkat sebagai dosen PAI) sangat tidak mencukupi; (2) Persoalan beban tugas dosen PAI, yaitu beban tugas dosen PAI terlalu banyak 3-4 kelas, di luar tugas pokok sebagai dosen filsafat. Termasuk persoalan beban tugas dosen PAI, yaitu masih sangat besar, karena bagi dosen UGM masih ditambah tugas di fakultas masing-masing juga bila dosen tersebut dari UIN; (3) Persoalan pembinaan dosen PAI UGM, yaitu dosen PAI yang berasal dari berbagai instansi menyulitkan pembinaan, termasuk pembinaan menjadi kurang rutin dan kurang banyak jumlah pembinaannya; (4) Persoalan kordinasi dengan dosen PAI, dilakukan satu kali satu semester pada waktu plotting jadwal perkuliahan; (5) Persoalan pengembangan karir dosen PAI, yaitu sudah dilaksanakan oleh masing-masing institusi, namun untuk karir khusus dosen PAI di UGM belum dapat dilaksanakan; (6) Persoalan kreatifitas dan inovasi dosen PAI UGM, pada umumnya dosen PAI telah memiliki berbagai metode dan pembelajaran yang menarik bagi mahasiswa, sehingga perkuliahan berjalan dengan hasil baik. Namun demikian dosen PAI muda biasanya lebih kreatif; dan (7) Persoalan dosen PAI lainnya adalah karena mereka berada pada dua institusi (UGM-UIN) maka kontrol aktivitas kurang dapat dilaksanakan secara maksimal. Di samping itu terdapat pendanaan yang terbatas dari negara untuk persoalan insentif dosen PAI.

E. PENUTUP **Simpulan**

Beberapa simpulan dari penelitian ini adalah: (1) pemenuhan kebutuhan dosen tetap PAI di UGM masih kurang; (2) Rasio beban tugas dosen PAI UGM dengan jumlah mahasiswa belum seimbang; (3) Banyaknya Dosen PAI dari instansi lain, menyulitkan dalam pembinaan, kecuali pembinaan oleh instansi masing-masing instansi, dan mengaktifkan kordinasi pembinan; (4) Pengembangan karir dosen PAI UGM selama ini dikelola oleh masing-masing institusi (yaitu Fakultas Filsafat UGM- UIN, sehingga kurang memenuhi persoalan yang berarti; (5) Kreatifitas dan inovasi dosen PAI UGM dalam pengembangan metode, media dan strategi pembelajaran PAI belum sepenuhnya menjadi tradisi; (6) Kontrol aktivitas dosen PAI belum dilaksanakan secara maksimal, karena

menyangkut asal dosen PAI yang berasal dari dua institusi (UGM-UIN); dan (7) Pendanaan untuk insentif dosen PAI masih terbatas, terutama dari negara.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas dapat disarankan beberapa hal penting yaitu: (1) Perlu pemenuhan kebutuhan dosen PAI tetap di UGM, melalui sistem rekrutmen yang terbuka dan transparan. ; (2) Perlu rasionalisasi beban tugas dosen PAI UGM dengan cara penambahan jumlah dosen PAI baik dosen PAI tetap atau tidak tetap; (3) Resiko UGM menerima Dosen PAI dari instansi lain, adalah masalah pembinaan yang sulit, kurang rutin dan volume pembinaan yang kecil. Pembinaan sebaiknya diserahkan kepada instansi masing-masing, dan mengaktifkan kordinasi. Selama ini kordinasi dengan dosen PAI dilakukan satu kali satu semester pada waktu plotting jadwal perkuliahan; (4) Pengembangan karir dosen PAI, perlu dikelola oleh masing-masing institusi (Fakultas Filsafat UGM- UIN) sehingga tidak akan menemui persoalan berarti; (5) Perlu peningkatan kreatifitas dan inovasi dosen PAI UGM dalam

pengembangan metode, media dan strategi pembelajaran PAI; (6) Asal dosen PAI dari dua institusi (UGM-UIN) maka kontrol aktivitas dosen PAI perlu dilaksanakan secara maksimal; dan (7) Perlu penambahan anggaran dari pemerintah yang selama ini terbatas, untuk memenuhi insentif dosen PAI yang lebih layak.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara, 1997.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Dunn, William N dalam *Analisis Kebijakan*. Buku terjemahan Drs. Samodra Wibawa, MA dkk. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Dudin, Achmad dan Imam Thalhah. "Faham Keagamaan Dosen PAI di PTU". Dalam Prosiding Seminar Hasil Penelitian, Puslitbang Pendidikan dan Keagamaan, 2014.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln (Eds). *Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 1994.
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Harsoyo, Bangun. *Pengelolaan Air Irigasi*. Surabaya: Dinas Pertanian Jawa Timur, 1977.
- Peraturan Mendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidik.
- Peraturan Mendiknas Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No 41, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4496
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Soewarno, Handayaniingrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Sudarsono. *Beberapa Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers. 1992.
- Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas No:43/DIKTI/ Kep/2006 tentang perkuliahan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1) dan Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Wardoyo. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1980.
- Zainal Abidin, Said *Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Jakarta Penerbit: Yayasan Pancur Siwah, 2004.

THE CASE OF INDONESIAN HAJJ PILGRIMS DEPARTING FROM THE PHILIPPINES

ZAENAL ABIDIN

ABSTRACT

This paper explores the challenges and issues of Hajj handling through the Philippines, the treatment to Indonesian 177 detained pilgrims and the government efforts to resolve the issues. The limited Indonesian hajj quota has caused long waiting lists for enthusiastic pilgrims to perform the fifth pillar of Islam. In some regions, such as South Sulawesi, this waiting list can take up to 40 years. The high enthusiasm of South Sulawesi people has been sought as an opportunity by travel agents to embark the pilgrims through the neighboring country whose quota has not yet fulfilled, e.g. the Philippines. As many as 177 Indonesian pilgrims during the hajj season 1438H/2016 have been processed through the Philippines agency by forging documents. This action resulted in the cancellation of hajj departure and the detention of the pilgrims by the Philippines authority. These pilgrims are detained in the Special Intensive Care Area (SICA) with minimum facilities. Through diplomatic discussion among the Indonesian Embassy in Manila, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Religious Affairs and Indonesian Police Agency, these 177 pilgrims have been released and sent home.

KEY WORDS: Hajj Through the Philippines, Waiting List, Illegal Documents

PEMBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI INDONESIA MELALUI FILIPINA

ABSTRAK

Paper ini membahas tentang lika-liku pelaksanaan ibadah haji melalui negara Filipina, penanganan selama penahanan di Filipina, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kuota haji untuk Indonesia dirasakan sangat kurang dan mengakibatkan daftar tunggu (*waiting list*) sangat lama di daerah tertentu hingga mencapai 40 tahun, salah satunya di Sulawesi

Selatan. Tingginya animo masyarakat Sulawesi Selatan untuk menunaikan ibadah haji dijadikan peluang usaha bagi pihak-pihak perorangan maupun agen travel untuk memberangkatkan calon jemaah dari negara tetangga yang kuotanya tidak terpenuhi. Kasus keberangkatan 177 jemaah calon jemaah haji melalui Filipina pada musim haji 1438H/2016M, dilakukan dengan menggunakan dokumen ilegal yang berakhir pada pembatalan keberangkatan dan penahanan. Pemerintah Filipina melakukan penahanan terhadap 177 orang Indonesia, di penjara *Special Intensive Care Area (SICA)* dengan fasilitas yang sangat minim. Pembebasan dan pemulangan 177 calon jemaah haji Indonesia yang gagal berangkat melalui Filipina merupakan upaya kerja sama antara Duta Besar RI di Manila, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kepolisian RI.

KATA KUNCI: Haji melalui Filipina, Daftar Tunggu (*waiting list*), Ilegal, Pemalsuan Dokumen

THE GRAND MOSQUE OF PARIS: A MOSQUE AT THE HEART OF WORLD FASHION

MUHAMMAD RAIS

ABSTRACT

This article describes the ritual, administrative, social, economic, cultural, and political functions and activities of the Grand Mosque of Paris. The primary and secondary data were obtained through a short visit to Paris. Focus group discussion was conducted with the mosque management, imam, jama'ah, and the visitors. The FGD is then triangulated with the data from observation inside and around the mosque. Some literatures and documents related to the mosque were also collected as the secondary data. Data were articulated and analyzed by using descriptive qualitative method. The study found that the functions and roles of mosque in Paris are well articulated both from the point of view of its internal aspect and external supports. France as a country supports the existence of this mosque

as a gratitude for the service of Muslim soldiers who fought for France liberty in the past. Over time, the mosque evolved and its roles and functions went through some diversification as a response to the contemporary Islamic community needs.

KEY WORDS: *The Grand Mosque of Paris, Islam, contemporary Muslims, diplomacy*

MASJID AGUNG PARIS DI JANTUNG KIBLAT MODE DUNIA

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi ritual, fungsi/aktivitas administrasi dan sosial (*activité administrative et sociale*), ekonomi, budaya serta politik kebudayaan Masjid Agung Paris. Data primer dan sekunder diperoleh melalui kunjungan singkat ke Kota Paris. Dalam waktu yang relatif singkat tersebut, dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan diskusi kelompok sasaran (FGD) dengan beberapa orang pengelola, imam masjid, dan jamaah yang kebetulan berada dalam lingkungan masjid, serta para pengunjung. Data-data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGD dikonfirmasi di lapangan melalui pengamatan langsung dengan mengelilingi semua bagian dan sisi masjid. Beberapa literatur dan dokumen yang tersedia dalam perpustakaan masjid tak luput direkam sebagai bahan pendukung (data sekunder). Setelah diartikulasikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, maka fungsi dan peran masjid di hampir semua lini kehidupan umat Islam di Kota Paris, dan Negara Prancis secara umum terdeskripsi dengan apiknya, baik dari sisi historis, keberadaan masjid sebagai bagian dari balas jasa pemerintah dan warga Prancis atas pengorbanan ratusan ribu umat Islam yang gugur di medan perang mempertahankan wilayah kedaulatan Prancis, maupun fungsi dan peran lainnya masjid yang lain.

KATA KUNCI: Masjid Paris, Islam di Prancis, Muslim kontemporer, diplomasi

THE MAPPING OF WAKAF LAND IN KAMPAR REGENCY, RIAU PROVINCE IN 2017

M. TAUFIK HIDAYATULLOH AND SELAMET

ABSTRAK

The results showed that, one, the main problem of uncertified wakaf land in Kampar regency is due to technical matters of administration at the time of wakaf registration. Two, among three issues on wakaf processing, the aspect of legal culture is the most common problem. Three, the issue of wakaf management in Kampar regency, Riau Province has not received sufficient attention from local government, religious figures, mass organizations and society in general. Additionally, the Indonesian Wakaf Board (BWI) in Kampar Regency itself has not yet been established to date. Four, the issues found in the office of religious affairs are: (a) the lack of operational funds in the management of wakaf certificates, (b) the lack competence of the administration which still depends on the cross-sectoral institutions, (c) technical weakness of internet network and the weakness of SIWAK system. Five, wakaf land with no AIW while the wakif and witnesses have died in some parts of Kampar Regency have been handled by the head of village.

KEY WORDS: *Wakaf Land, AIW, Wakaf Management*

PEMETAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU TAHUN 2017

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Problem utama banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kabupaten Kampar adalah hal teknis administrasi pada saat pengurusan sertifikasi wakaf itu sendiri, (2) Di antara 3 masalah perwakafan, aspek budaya hukum inilah yang paling banyak ditemukan permasalahan. (3) Secara umum, persoalan pengelolaan wakaf di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau masih belum mendapatkan perhatian yang cukup, baik dari Pemerintah Daerah, Kankemenag, KUA, BPN, Tokoh Agama, Ormas Keagamaan maupun

masyarakat secara luas. Sementara Badan Wakaf Indonesia (BWI) tingkat Kabupaten Kampar sendiri sampai saat ini belum terbentuk. (4) Problem di lingkungan Kankemenag adalah; a) Ketiadaan dana operasional dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf, b) Lemahnya administrasi yang masih tergantung pada instansi lintas sektoral, selain secara internal memiliki daya dukung administrasi lemah, c) Teknis yaitu lemahnya jaringan internet dan kelemahan sistem SIWAK. (5) Penanganan tanah wakaf yang belum ber-AIW sementara wakif dan saksinya telah meninggal pada sebagian kecil wilayah Kabupaten Kampar ditangani Kepala Desa.

KATA KUNCI: Tanah Wakaf, AIW, Manajemen Wakaf.

THE POLICY OF ISLAMIC EDUCATION TEACHERS: A CASE STUDY IN UNIVERSITY OF GAJAHMADA YOGYAKARTA

ACHMAD DUDIN

ABSTRACT

This article presents the results of research in 2015 regarding the policy implementation for Islamic education teachers in higher education. This research took the case of Gajah Mada University (UGM) Yogyakarta. Data and information were obtained through qualitative research, through interviews with lecturers of Islamic Religious Education (PAI), experts and related officials and analysis of PAI lecturer management policy at UGM. The findings of this research point out some issues of PAI lecturers management, for example: the big task load for the lecturers, lack number of lecturers, lack of creativity and innovation, and lack of incentives. From these findings, it is suggested that some aspects need to be taken into accounts: the rationale of the lecturer's duties need to be revisited, the recruitment for new lecturers, the development of lecturers' career and competence, to improvement the creativity and innovation for lecturers through the training program, and the increase of lecturers' incentives through budgeting.

KEY WORDS: Policy, PAI lecturers, University of Gajah Mada

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DOSEN PAI: STUDI KASUS DI KAMPUS UGM YOGYAKARTA

ABSTRAK

Artikel ini memaparkan hasil penelitian pada tahun 2015 mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan dosen PAI di perguruan tinggi, yang menuntut perbaikan. Penelitian ini mengambil kasus di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Data dan informasi diperoleh melalui penelitian kualitatif, melalui wawancara dengan para dosen Pendidikan agama Islam (PAI), pakar dan pejabat terkait serta analisis terhadap kebijakan pengelolaan dosen PAI di UGM. Temuan penelitian ini menyebutkan beberapa persoalan kebijakan pengelolaan dosen PAI, misalnya: kurang rasionalitas beban tugas, kurangnya pembinaan dosen, kurangnya daya kreasi dan inovasi, serta persoalan insentif dosen PAI. Dari temuan ini disarankan beberapa hal, yaitu: perlunya memperhatikan rasional beban tugas dosen, rekrutmen untuk pemenuhan dosen, meningkatkan pembinaan dan karir dosen, meningkatkan kreatifitas dan inovasi dosen dalam pembelajaran PAI melalui program Diklat, dan perlunya penambahan insentif dosen PAI yang memadai melalui upaya penganggaran.

KATA KUNCI: Kebijakan, Dosen PAI, Kampus UGM

THE ISLAMIC VALUES CONTAINED IN BANTENESE FOLKLORE "THE LEGEND OF GUNUNG PINANG" RELATED TO DEVOTION TO PARENTS

ASEP SAEFULLAH

ABSTRACT

This paper reviews one of the folklores from Serang Banten namely "the Legend of Gunung Pinang". This story is related to children duty to parents, especially mothers. The purpose of this article is to describe the story and to analyze the contained Islamic values in it. In the context of national education, this is related to the national educational objectives as mentioned in the UU

1945, Article 31, "the government seeks and organizes national education system which enhances faith, piety and noble characters in order to educate the nation". From the Islamic perspective, being dutiful to parents is a good moral character besides faith to God, which can be the basis of character education. In the horizon of Indonesian civilization, noble characters are important to develop, including the good conduct to parents. This study found that the story of the Legend of Gunung Pinang contains values relevant to character education, especially about *birr al-wâlidain* (filial piety).

KEY WORDS: Legend, Character Education, Devotion to Parents, Serang

NILAI PENDIDIKAN AGAMA DALAM CERITA RAKYAT BANTEN: LEGENDA GUNUNG PINANG DAN BERBAKTI KEPADA ORANG TUA

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji salah satu cerita rakyat di Serang Banten, yaitu "Legenda Gunung Pinang". Cerita ini terkait dengan akhlak anak terhadap orang tua, khususnya ibu. Adapun tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan cerita tersebut dan menganalisis nilai-nilai pendidikan agama yang terdapat di dalamnya. Dalam konteks pendidikan nasional, hal ini terkait dengan tujuan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945, Pasal 31, yaitu: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Dari persepektif Islam, selain iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, istilah akhlak mulia itulah yang dapat dijadikan dasar pendidikan karakter. Dalam khazanah peradaban bangsa Indonesia banyak dijumpai nilai pendidikan karakter, secara khusus tentang akhlak mulia tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa cerita daerah *Legenda Gunung Pinang* dari Serang Banten mengandung nilai yang relevan dengan pendidikan karakter, khususnya tentang *birr al-wâlidain* (berbakti kepada orang tua).

KATA KUNCI: Legenda, Gunung Pinang, Pendidikan Agama, Serang, Akhlak, Karakter

DEVELOPING CHILDREN CHARACTER THROUGH EARLY EDUCATION PROGRAM AT RAUDHATUL ATHFAL IKHLAS IN PADANG WEST SUMATERA

SUPRAPTO

ABSTRACT

Raudhatul Athfal (RA) education is very important for young learners to help laying the groundwork for their attitudes, knowledge, skills and creativity. These aspects are indispensable for students to adapt to their environment and for their further growth and development. RA as an institution of early childhood education based on Islamic education values plays an important role for the development of Muslim generation by incorporating faith and piety to Allah The Almighty intensively. Albeit these advantages, Directorate of Islamic Education has insufficient data about the number of qualified RA with clear criteria. This research employed qualitative approach through field observation, interview and document study. The findings of this study provide recommendations that RA development needs the involvement of all components from the school, government, and society. In addition, curriculum development needs to be tailored to local needs and school needs; the content of learning materials emphasizes the formation of attitudes, ethics and the introduction of the love of the homeland; the learning model developed is student-centered.

KEY WORDS: Child Character, Early Education, Raudhatul Athfal

PENGEMBANGAN KARAKTER ANAK MELALUI PROGRAM UNGGULAN DI RAUDHATUL ATHFAL IKHLAS KOTA PADANG SUMATERA BARAT

ABSTRAK

Pendidikan Raudhatul Athfal (RA) sangat penting bagi anak-anak usia dini untuk

membantu meletakkan dasar perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya ciptanya. Aspek-aspek ini sangat diperlukan anak didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. RA sebagai lembaga pendidikan anak usia dini berciri khas Islam memainkan peranan penting bagi perkembangan generasi umat Islam karena pada lembaga inilah pembinaan terhadap anak dengan penanaman iman dan takwa kepada Allah SWT dilakukan secara intensif. Permasalahannya adalah sampai saat ini Direktorat Pendidikan Islam belum memiliki data tentang RA yang bermutu atau berkeunggulan dengan kriteria yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Temuan dari penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa untuk menjadikan RA memiliki keunggulan atau berkualitas perlu keterlibatan seluruh komponen yaitu sekolah, pemerintah, maupun masyarakat. Di samping itu, perlu dilakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan berbasis pada sekolah (*school-based*); muatan materi pembelajaran menekankan pada pembentukan sikap, etika dan pengenalan cinta tanah air; model pembelajaran yang dikembangkan adalah model sentra.

KATA KUNCI: Karakter Anak, Program Unggulan, Raudhatul Atfal

PESANTREN BASED MADRASAH

FARIDA HANUN

ABSTRACT

This study aims to determine pesantren-based madrasah at MTS Al Hikmah Bandar Lampung by using qualitative method. Data collection using interviews and literature study. The results of the study show that: (a) the development of MTs Al Hikmah is supported by the availability of qualified leaders, the integration of madrasah curriculum and pesantren curriculum through the Boarding School system, adopting modernization in the form of providing various learning facilities and student achievement supports. Ministry of Religious affairs need to improve the competence of teachers through

training and need to equip multimedia learning facilities at MTs Al Hikmah Bandar Lampung.

KEY WORDS: *Organization, Madrasah, Pesantren, Boarding School*

MADRASAH BERBASIS PESANTREN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan madrasah berbasis pesantren di MTS Al Hikmah Bandar Lampung dengan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi Kepustakaan. Hasil studi menunjukkan: (a) penyelenggaraan MTs Al Hikmah didukung ketersediaan pimpinan yang berkualitas, perpaduan kurikulum madrasah dan kurikulum pesantren melalui sistem pembelajaran Boarding School, mengadopsi kemoderenan dalam bentuk menyediakan beragam fasilitas pembelajaran, dan prestasi siswa yang tinggi, (b) Kementerian Agama perlu melakukan peningkatan kompetensi guru melalui diklat dan melengkapi sarana pembelajaran multimedia di MTs Al Hikmah Bandar Lampung.

KATA KUNCI: Penyelenggaraan, Madrasah, Pesantren, Boarding School

THE INTEGRATION OF ISLAMIC INTEGRATED EDUCATION AT SMAN ISLAM NURHIDAYAH SURAKARTA

QOWAID

ABSTRACT

The phenomenon of the emergence and development of the Integrated Islamic School is interesting to examine. Schools that try to give answers to the wishes of some people to maximize out put education, implemented through the integration of Islamic Education with other subjects. One of them is the Nur Hidayah Islamic Junior High School Surakarta. This research is done through qualitative approach. Data collection techniques are conducted through interviews, observations, and

document review. The results show that the Nur Hidayah Islamic Junior High School Surakarta which was established in 2004 has a number of academic achievements and many interested parents prospective students. This school implements a full day school system that prioritizes Islamic Religious Education while maintaining another academic aspect. Integrated Islamic Education is integrated in several activities, including integrated through extracurricular activities, school management, parenting forums, and integration through teachers' subjects and competencies. This school offers students to grow and develop balanced and whole, emphasizing the quality of their intellectual, emotional, spiritual, and creative intelligence, and their ability to cope with life.

KEY WORDS: *Islamic Integrated School, Islamic Education*

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERPADU PADA SEKOLAH MENENGAH ISLAM NUR HIDAYAH SURAKARTA

ABSTRAK

Fenomena kemunculan dan perkembangan Sekolah Islam Terpadu menarik untuk diteliti. Sekolah yang berusaha memberi jawaban atas keinginan sebagian masyarakat untuk memaksimalkan *output* pendidikan, diimplementasikan melalui pengintegrasian Pendidikan Agama Islam dengan mata pelajaran lainnya. Salah satunya adalah SMPIT Nur Hidayah Surakarta. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMPIT Nur Hidayah Surakarta yang berdiri tahun 2004 memiliki sejumlah prestasi akademis dan banyak diminati orang tua calon murid. Sekolah ini menerapkan sistem *full day school* yang mengedepankan Pendidikan Agama Islam dengan tetap mengunggulkan aspek akademis yang lain. Pendidikan Agama Islam Terpadu diintegrasikan dalam beberapa kegiatan, antara lain melalui kegiatan ekstrakurikuler, manajemen sekolah, forum orang tua siswa, dan integrasi melalui

mata pelajaran dan kompetensi guru. Sekolah ini menawarkan siswa untuk tumbuh dan berkembang secara berimbang dan utuh, dengan menekankan kualitas kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan kreatifitas, serta kemampuan mereka dalam menghadapi kehidupan.

KATA KUNCI: Sekolah Islam Terpadu, Pendidikan Agama Islam

THE ROLES AND IMPACTS OF MUI FATWA ON SOCIAL MEDIA TOWARDS THE LIFE OF NATION AND COUNTRY

NASRULLAH NURDIN

ABSTRACT

In this modern era, the use of social media is inseparable from our internet users. Through social media, we share information and communicate more rapidly and easily than we do in the past decades. Ironically, social media is often misused by the netizens for spreading hate speeches, hostility, and cracking the nationalism. Dealing with this critical situation, the Indonesian Council of Ulama (MUI) attempted to contribute solving to this issue by issuing a new fatwa on social media. The fatwa is Fatwa MUI No. 24 Year 2017 on the Law and Guidance of Social Media Affairs. This article explores and analyzes the follow-ups, the implications, and the effectivity of this fatwa. More broadly, this article analyzes the roles and impacts of MUI fatwa in the context of nation state.

KEY WORDS: *MUI fatwa, Social Media, Ministry of Communication and Information, UU ITE, Supports of DPR*

PERAN DAN PENGARUH FATWA MEDSOS MUI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

ABSTRAK

Pada zaman yang begitu modern ini, penggunaan media sosial (medsos) tak bisa lagi

dipisahkan dari masyarakat pengguna internet (netizen). Lewat media sosial, kita bisa membagikan informasi (*sharing information*) dan berkomunikasi dengan lebih cepat sekaligus lebih mudah daripada masa-masa sebelumnya. Namun cukup ironis, media sosial acap kali disalahgunakan oleh sejumlah oknum di dunia virtual. Bukannya untuk menjalin komunikasi antar sesama, media sosial justru digunakan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian, menebar permusuhan, dan meretakan hubungan berbangsa-bernegara. Dengan kondisi yang makin tak beradab ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun ikut turun tangan. Untuk mengatasi problematika demikian akut, MUI mengeluarkan sebuah fatwa baru. Lembaga yang mewadahi beragam aspirasi ormas Islam ini menerbitkan Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Lalu, bagaimana kelanjutan, kebermanfaatan dan efektivitas keluarnya Fatwa MUI tersebut? Artikel ini berupaya mendedahkan sekaligus menganalisis bagaimana peran dan pengaruh fatwa MUI dalam konteks berbangsa dan bernegara.

KATA KUNCI: Fatwa MUI, Media Sosial, Kementerian KOMINFO, UU ITE, Dukungan DPR RI

A

Achmad Dudin

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Email: achmaddudin@gmail.com

“KEBIJAKAN PENGELOLAAN DOSEN PAI: STUDI KASUS DI KAMPUS UGM YOGYAKARTA”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 173-186

Asep Saefulloh

Kandidat Doktor Ilmu Sastra Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung. Email: asepfm@yahoo.com; <https://independent.academia.edu/AsepSaefullah8>

“NILAI PENDIDIKAN AGAMA DALAM CERITA RAKYAT BANTEN: *LEGENDA GUNUNG PINANG* DAN BERBAKTI KEPADA ORANG TUA”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 187-204

F

Farida Hanun

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. E-Mail: farida_ridwan@yahoo.com

“MADRASAH BERBASIS PESANTREN”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 223-234

M

Muhammad Rais

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jl. AP. Pettarani No. 72, Makassar. Email: raispuslit2@gmail.com

“MASJID AGUNG PARIS DI JANTUNG KIBLAT MODE DUNIA”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 137-150

M. Taufik Hidayatulloh dan Selamat

Islamic counselor at Bogor Department of Religious Affairs, Jalan Jl. Bersih No. 1, Komplek Pemda Cibinong Bogor. Email: taufikmtht@yahoo.co.id.

Researcher at the Research Center for Community Service on Religion and Religious Services, Ministry of Religious Affairs, Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta

“PEMETAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU TAHUN 2017”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 151-172

N

Nasrulloh Nurdin

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Alumni Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan PWNUI DKI Jakarta. Email : anasresidence@gmail.com

“PERAN DAN PENGARUH FATWA MEDSOS MUI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA”
Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 249-258

S

Suprpto

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
E-mail: suprpto.litbang@yahoo.com

“PENGEMBANGAN KARAKTER ANAK MELALUI PROGRAM UNGGULAN DI RAUDHATUL
ATHFAL IKHLAS KOTA PADANG SUMATERA BARAT”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 205-222

Q

Qowaid

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Jalan M.H. Thamrin 6 Jakarta. Email:
qowaidbmasyhuri@gmail.com

“PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TERPADU PADA SEKOLAH
MENENGAH ISLAM NUR HIDAYAH SURAKARTA”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 235-248

Z

Zaenal Abidin

Peneliti Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, RI, Jl. M.H. Thamrin 6, Jakarta. Email:
bidin04oke@gmail.com

“PEMBERANGKATAN CALON JEMAAH HAJI INDONESIA MELALU FILIPINA”

Jurnal Dialog Vol. 41, No.2, Des 2017. hal: 127-136

KRITERIA PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian dengan topik masalah sosial dan keagamaan.
2. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
3. Naskah ditulis dengan kaidah tata Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baku dan benar.
4. Penulis membuat surat pernyataan bahwa naskah yang dikirim adalah asli dan memenuhi persyaratan klirens etik dan etika publikasi ilmiah (bebas dari plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi) berdasarkan Peraturan Kepala I- [PI No. 8 Tahun 2013 dan No.5 Tahun 2014.
5. Apabila naskah ditulis dari hasil penelitian kelompok dan akan diterbitkan sendiri, diharuskan menyertakan surat pernyataan persetujuan tertulis dari anggota kelompok yang lain.
6. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4).
7. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maksimal 15 kata menggambarkan isi naskah secara keseluruhan.
8. Judul Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kapital, bold, center, sedangkan judul Bahasa Inggris ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, italic, bold dan center.
9. Nama penulis tanpa gelar akademik diletakkan di tengah (center), Nama instansi, alamat instansi, dan email penulis diletakkan dalam satu baris dan di tengah (center).
10. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwi bahasa (Inggris dan Indonesia). Abstrak ditulis dalam satu paragraph, diketik dengan 1 spasi, jenis huruf Palatino Linotype ukuran 11, jumlah kata 150-200 kata. Abstrak Bahasa Inggris diketik dengan menggunakan format italic.
11. Abstrak, berisi gambaran singkat keseluruhan naskah mengenai permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan rekomendasi kebijakan.
12. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah *Palatino Linotype* ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki.
13. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah *Arabic Transparent* atau *Traditional Arabic* ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki.
14. Penulisan kutipan (footnote) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago Contoh:

Footnote

Satu Penulis

Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Dua Penulis

John B. Christianse and Irene W. Leigh, *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices* (Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002), 45-46.

Artikel pada Jurnal

Footnote

Tom Buchanan. "Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Bibliografi

Satu Penulis

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane press, 1993.

Dua Penulis

Christianse, John B., and Irene W. Leigh. *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices*. Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002.

Tiga Penulis

Venolia, Jean P., Georgio Cordini, and Joseph Hitchcock. *What Makes a Literary Masterpiece*. Chicago: Hudson, 1995.

Banyak Penulis

Bailyn, Bernard, et al. *The Great Republic*. Lexington, MA: D.C. Heath, 1977.

Penulis Anonim

Beowulf: A New Prose Translation. Trans. E. Talbot Donaldson. New York: W.W. Norton, 1966.

Multi- Volume

Dorival, Bernard, *Twentieth Century Painters*. Vol 2. New York: Universe Books, 1 958.

Hasil Produksi Editor

Guernsey, Otis L. , Jr., and Jeffrey Sweet, eds. *The Burns Mantle Theatre Yearbook cf 1989-90*. New York: Applause, 1990.

Artikel pada Jurnal

Buchanan, Tom. "13etween Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Artikel pada Prosiding/Conference Paper

Tidak diterbitkan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." Paper presented at the 16th Annual Agriculture Conference, Pietersburg University, South Africa, April 8-11, 2003.

Diterbitkan dan diedit

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." *In Proceedings of the 16th Annual Agricultural Conference*, April 8-11, 2003, Pietersburg University, South Africa. Edited by Jan Van Riebeeck. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004.

Diterbitkan tanpa pengeditan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting," *In Agricultural in the North: Are We Making a Difference?* Conference Proceeding, April 8-11, 2003. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004,

Sumber Online

Website

Tice-Deering, Beverly. *English as a Second Language*. <http://www.seattlecentral.org/faculty/bticed> (accessed July, 2005). University of Chicago Dept. of Romance Languages and Literatures. Romance Languages and Literature. <http://humanities.uchicago.edu/romance> (accessed July 27, 2009).

E-Book

Thornton, Chris. *Truth from Trash: How Learning Makes Sense*. Cambridge, MA: MIT Press, 2000. <http://emedia.netlibrary.com>.

E-Journal

Warr, Mark, and Christophers G. Ellison. "Rethinking Social Reaction to Crime: Personal and Altruistic Fear in Family Households." *American Journal of Sociology* 106, no. 3 (2000): 551-78. <http://www.journals.uchicago.edu/AJS/journal/issues/v106n3/050125/050126.html>. (accessed June 28, 2003),

15. Transliterasi berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987.
16. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan, menguraikan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian literatur, menguraikan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%)
 - c. Metode penelitian, berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%)
 - d. Hasil penelitian dan pembahasan (50%)
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%)
 - f. Ucapan terima kasih
 - g. Daftar Pustaka. Jumlah sumber acuan dalam satu naskah paling sedikit 10 dan 80% di antaranya merupakan sumber acuan primer dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber acuan primer adalah sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik penelitian dapat berupa tulisan dalam makalah ilmiah dalam jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, hasil penelitian di dalam disertasi, tesis maupun skripsi.
17. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

